

ABSTRAK

Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peranan penting dalam suatu perseroan terbatas karena notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta-akta dalam Perseroan Terbatas sekaligus merupakan satu-satunya kuasa dari calon pendiri atau kuasa direksi Perseroan dalam proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan untuk memberikan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas, pencatatan data perseroan dalam Daftar Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum dan mengumumkan Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)

Dalam prakteknya, suatu data perseroan yang terdapat dalam Daftar Perseroan pada SABH dimungkinkan terdapat perbedaan data dengan akta-akta notaris. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketidacermatan notaris dalam melakukan pengisian data perseroan pada SABH dan tidak cermat memeriksa kesesuaian data suatu perseroan pada akta-akta notaris dan daftar perseroan. Dengan adanya perbedaan data perseroan tersebut, dapat menimbulkan sengketa hukum dan kerugian yang timbul kemudian hari apabila tidak melakukan perbaikan data perseroan, yang akan dialami oleh para pendiri, pemegang saham Perseroan Terbatas maupun notaris.

Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai Keabsahan Data Perseroan dalam hal terdapat Perbedaan antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan dan mengenai Pertanggungjawaban terhadap Perbedaan Data Perseroan dalam Akta Notaris dan Daftar Perseroan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). melanggar hukum dimana notaris yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci : Akta, Daftar Perseroan, Notaris, Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Badan Hukum,

ABSTRACT

Notary and Minister of Justice and Human Rights have an important role in a limited liability company because the notary is an official authorized to make deeds in Limited Liability Company as well as the sole authorization of the candidate of founder or authorization of the Company in the process of legalization of legal entity, approval of budget changes basis and also notification of amendment to the Company's Articles of Association and / or Limited Liability Data on the Legal Entity Administration System (SABH). While the Minister of Justice and Human Rights acts to provide legalization of legal entities, approval of amendments to the articles of association and also notification of changes to the articles of association and / or data of Limited Liability Company, the registration of corporate data in the Company Register on the Legal Entity Administration System and announced Limited Liability Companies in Addendum to State Gazette of the Republic of Indonesia (TBNRI)

In practice, the Limited Liability Company data contained in the Company Register in SABH may have data that is different from the notarial deed. This may occur due to the notary inaccuracy in completing the company's data in SABH and not carefully checking the feasibility of the company's data on notarial deeds and company lists. Due to differences in corporate data, it can lead to future legal disputes and losses if not revised company data, which will be experienced by the founders, Limited Company shareholders and notaries.

From this issue, there is a legal issue concerning Legitimacy of Corporate Data in the event of any Difference between Notary Deed and Company Register and Responsibility to Difference of Company Data in Notary Deed and Company Register. This research is normative legal research, using statute approach, and conceptual approach. violates the law in which the notary concerned does not fulfill its legal obligations.

Keywords: Deed, Notary, Limited Liability Company, Legal Administration System, Company Register